

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
KOTA BIMA

TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Bakesbangpol Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2019 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bima 2018–2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Bakesbangpol ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Bakesbangpol selama tahun 2019.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan Visi Misi, rencana strategis serta program kerja badan dan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- b. Melakukan penyediaan penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- d. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;

- e. Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- f. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

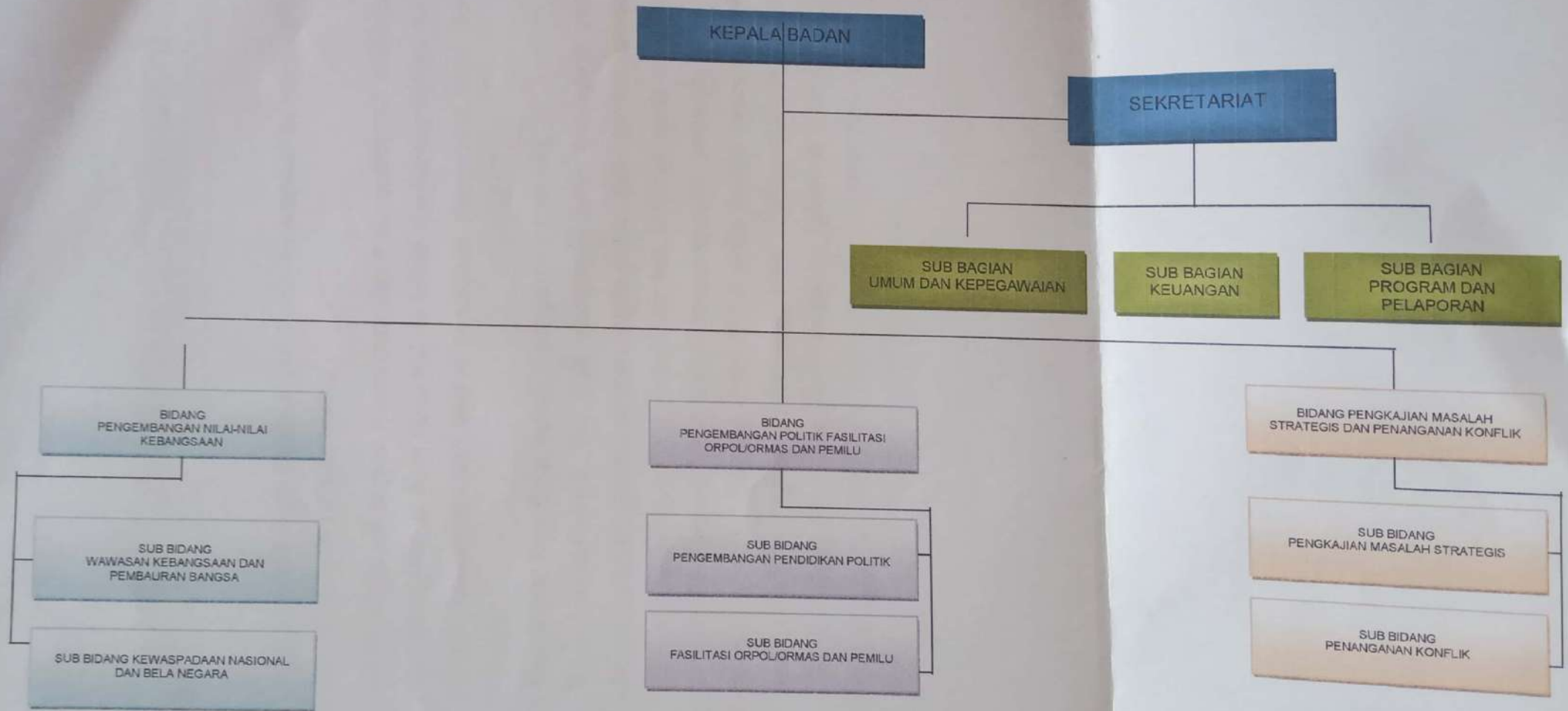
1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
- 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan , terdiri dari :
 - o Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa
 - o Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
 - b. Bidang Politik, Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu terdiri dari :
 - o Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik
 - o Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu
 - c. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - o Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis
 - o Sub Bidang Penanganan Konflik

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

A. Visi, Misi, Sasaran dan Strategis Kebijakan

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan politik dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan politik juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan di masyarakat dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2023 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima 2018-2023. Adapun visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

" Menciptakan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera".

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan;
2. Mendorong terwujudnya ketahanan masyarakat Kota Bima;
3. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Presentase Penurunan Angka Konflik Sosial	12,50 %	14,30 %	16,70 %	20,00 %	25,00 %

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2019 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn 2019} - \text{Jumlah Konflik Sosial Thn 2018}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn 2018}} \times 100\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2019 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019.

Tabel 2.3.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	12,50%

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada awal tahun 2019 terdiri dari 1 (Satu) sasaran strategis dan 1 (Satu) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 7 (Tujuh) program dengan total anggaran sebesar Rp.5.650.896.411,-

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	12,50%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 172.010.000	APBD
2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 557.985.000	APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	Rp. 2.178.196.500	APBD
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 636.841.400	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi indikator input, output, outcome dan benefit dari setiap kegiatan serta rencana kerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran. Laporan kinerja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang di cerminkan dari perolehan indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretansi keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Bahwa pada Tahun 2019 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 sasaran dimana sasaran tersebut masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1.1 . Adapun rincian pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat tabel 3.1.1 .

Tabel 3. 1.1. Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	12,50	12,50

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Selain perbandingan antara target dan realisasi, di dalam pembuatan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyajikan realisasi dan capaian kinerja dan juga membandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun kebelakang sehingga kita dapat mengukur sejauh mana tingkat realisasi dan capaian kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bima dari tahun ke tahun yang sajikan pada table berikut.

Tabel 3.1.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	12,50	12,50	100%

Kategori keberhasilan pencapaian Sasaran Bakesbangpol Kota Bima sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 menunjukkan bahwa sasaran Bakesbangpol berhasil dengan capaian kinerja 100,00 %

Tabel 3.1.5. Rekapitulasi Konflik Sosial Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Januari	9
2.	Pebruari	9
3.	Maret	7
4.	April	8
5.	Mei	6
6.	Juni	5
7.	Juli	5
8.	Agustus	5
9.	September	4
10.	Oktober	4
11.	November	4
12.	Desember	4
Jumlah		70

Penurunan konflik sosial dapat kita lihat dari tabel 3.1.4. terjadi penurunan konflik dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan tabel 3.1.5. di atas terjadinya penurunan angka konflik yang semakin menurun tiap tahunnya sedangkan laju persentase penurunan angka konflik semakin meningkat.

Adapun Upaya-upaya dalam rangka penurunan konflik sosial di masyarakat yaitu dengan cara di bentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang melakukan rapat koordinasi secara intens telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari makin menurunnya presentase konflik sosial di Kota Bima dan harus memiliki strategis yang khusus untuk mensiasati potensi konflik yang mungkin terjadi. Menurunnya konflik Sosial akan mengakibatkan Konduksifitas Daerah yang terjaga. dan Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator "Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial" pada tahun 2019 adalah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 12,50 % atau dengan persentase capaian kinerja 100%, dengan perhitungan sbb :

$$\begin{aligned} \% \text{ Penurunan Angka Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jmlh Konflik Sosial Thn 2019} - \text{Jmlh Konflik Sosial 2018}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn 2018}} \times 100\% \\ &= \frac{(70 - 80)}{80} \times 100\% \\ &= 12,5 \ % \end{aligned}$$

Capaian yang demikian dapat ditunjukkan oleh peran serta aparatur dan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pengkajian masalah strategis dan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengantisipasi gejala konflik .

3.1.3 *Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target Renstra 2018-2023 pada tahun berkenaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja thn 2019	Target Kinerja sesuai Renstra SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	12,50	12,50

Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulangnya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Penanganan konflik bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau Pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Peran serta masyarakat dalam penangulan konflik bahkan sangat penting terutama dalam upaya penyelesaian secara damai. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan, penghentian

konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan meliputi 1 (Satu) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Adapun perbandingan capaian dari indikator "Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial" sampai dengan tahun 2019 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019 dimana target Renstra tahun 2019 sebesar 12,5 % sedangkan capaian sampai saat ini sudah 100 %. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2019 maka target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2019 sudah maksimal. Upaya lain yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai indikator tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan; yang lain yang sangat mendukung pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada tahun 2019. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung yaitu :

1. Termonitoringnya Koordinasi Pencegahan Terorisme

Terorisme akan selalu menjadi acaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukakan secara serius. Sebagaian media, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, salah satu upaya mencegah adalah dengan menggelar kegiatan Forum Diskusi, dialog masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Paham radikal terus merasuk ke ruang public, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita, sehingga perlu upaya pecegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam upaya pencegahan terorisme dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh seminar dan sebagainya, dalam hal ini BNPT

menjadi partner dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme.

2. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Bima

FKUB memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan koordinasi secara rutin antar umat beragama. Pada tahun 2019 di laporkan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 14 kali dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 10 kali FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal membantu pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan secretariat bersama serta bantuan dana operasional bagi terlaksananya peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar umat beragama. Walaupun masih terjadi konflik didalam masyarakat namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan terus mendorong terwujudnya kerukunan di masyarakat dengan pemberdayaan FKUB.

3. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bima

Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadi konflik sosial di masyarakat, sehingga di perlukan upaya yang komprehensif dalam pecegahan, penanganan dan pasca konflik.

Untuk itu perlu mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). pada tahun 2019 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melakukan rapat koordinasi membahas konflik social yang terjadi di Kota Bima sebanyak 10 Kali sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 12 kali mengalami penurunan hal ini menunjukkan konflik sosial pada tahun 2019 mengalami penurunan.

3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam laporan ini diuraikan analisa keberhasilan terhadap kinerja Badan Kesbangpol melalui metode analisa internal, yaitu penilaian secara mandiri oleh Badan Kesbangpol Kota Bima terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang : efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan dan efektifitas pencapaian sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan, serta langkah-langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

a. Efektifitas Individual Kegiatan

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indicator, outcome, benefit dan impact dari kegiatan yang bersangkutan.

Efektifitas kegiatan dibagi atas 2 (dua) macam yaitu : Efektifitas individual kegiatan dan Efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Efektifitas individual kegiatan adalah suatu kegiatan mencapai tingkat outcome/benefit/input yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran merupakan kemampuan suatu kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis. Selama Tahun 2019 Badan Kesbangpol Kota Bima melaksanakan 32 Kegiatan berdasarkan

hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa 32 Kegiatan (100 %) telah dilaksanakan secara efektif.

b. Kegiatan Yang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outcome/benefit/impact 80% atau lebih. Selama tahun 2019 kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif adalah sebanyak 32 kegiatan atau 100 %

Dalam laporan ini kegiatan dikategorikan tidak efektif apabila hanya mampu mencapai rata-rata indikator outcome/benefit/impact kurang dari 80%. Selama tahun 2019 dari 32 kegiatan tidak terdapat kegiatan yang dikategorikan tidak efektif

Belum tercapainya sasaran strategis tersebut secara memuaskan antara lain disebabkan karena :

- Estimasi dalam proses perencanaan yang kurang akurat.
- Dukungan pendanaan pada dua sasaran strategis tersebut belum optimal.
- Dukungan Unit kerja lain masih belum optimal.
- Sumber daya manusia/aparatur pengelola kegiatan masih kurang memadai.

3.1.5. Analisis atas efisien Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diuraikan lewat dua analisa yaitu

1. Analisa Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menyempurnakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standart efisiensi. Dalam laporan ini standart efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana anggaran yaitu :

Bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

a. Analisa Pencapaian Sasaran

Dalam laporan ini sasaran dianggap tercapai apabila realisasi indikator-indikator kinerja sasaran berhasil diwujudkan rata-rata 100% atau lebih.

Selama Tahun 2019 dari 1 (Satu) sasaran strategis yang ingin diwujudkan Badan Kesbangpol sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis telah berhasil dicapai 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis didukung oleh personil yang memadai, anggaran / biaya yang cukup, komunikasi lintas sektoral yang berjalan dengan baik serta dukungan masyarakat/peserta kegiatan. Untuk keberhasilan suatu program/kegiatan agar tercapai sasaran strategis diharapkan dukungan yang baik dari personil, ketersediaan dana/anggaran yang memadai, koordinasi lintas sektoral berjalan baik dan mekanisme pencairan dana yang tepat waktu dan jelas peruntukannya.

3.1.6 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.7
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	• Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis	1.819.230.500,00
	• Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	248.790.000,00
	• Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	110.176.000,00
	• Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	384.055.000,00
	• Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	104.800.000,00
	• Koordinasi forum antar etnis	69.130.000,00
	• Penyuluhan Kepada Masyarakat	94.255.000,00
	• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	155.310.900,00
	• Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Rekomendasi Bantuan Keuangan	78.382.000,00
	• Pendidikan Politik bagi kelompok pemuda dan masyarakat dalam rangka Pileg/Pilpres	44.790.000,00
	• Sosialisasi Pileg/Pilpres bagi Pemilih Pemula	264.103.500,00

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di indonesia.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala

negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tersebut di atas, maka dapat diperoleh capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Pengukuran kinerja tersebut di atas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2019.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

3.1.7 Capaian Kinerja Eselon III dan IV

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima diukur dari Penetapan Kinerja Eselon III dan IV dapat di Jelaskan sebagai berikut:

Berbagai Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bima tahun 2019 sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan ketertiban yaitu sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase Potensi Konflik yang dapat di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |BAKESBANGPOL Kota Bima 2019

cegah pada tahun 2019 dari target 70% dan yang terealisasi 60%.
Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut
yaitu :

a. *Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan Keamanan dan Ketertiban melalui rapat-rapat koordinasi diikuti oleh Muspida dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi. Pada tahun 2019 dilakukan 12 Kali rapat koordinasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah potensi konflik yang terjadi selama tahun 2019.



a. *Kegiatan Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)*

Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi anggota FKDM yang berjumlah 12 Orang dalam upaya menyikapi beberapa insiden yang terjadi di Kota Bima serta menjangkau isu-isu strategis sehingga bisa disusun upaya antisipasi sejak dini terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas Keamanan dan Ketertiban. Pada tahun 2019 Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan 2 kali rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)



b. *Kegiatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS)*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kota Bima. Konflik tidak boleh di biarkan menjadi liar dan kemudian merusak tatanan kehidupan di masyarakat karena itu seharusnya kita mampu mengendalikan konflik sehingga dapat menjadi kekuatan yang mencerahkan dan bukan kekuatan yang menghancurkan oleh karena itu maka di bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang bertugas meredam potensi konflik sekaligus membentengi masyarakat dari masuknya paham-paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial sebanyak 2 kali. Dengan dilakukan kegiatan ini kita mengetahui jumlah penanganan konflik social pada tahun 2019.



- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar bangsa. Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase masyarakat dan aparatur yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan pada tahun 2019 dari target 60% dan yang terealisasi 60%. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

a. *Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama.*

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi antar umat beragama, pada tahun 2019 dilakukan 8 kali rapat koordinasi fkuib.



b. *Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.*

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk di Kalangan Tenaga Pendidik dan Siswa SMA/MAN/SMK yang ada di Kota Bima, pada tahun 2019 sebanyak 100

Orang Siswa SMA/MAN/SMK dan 50 Orang tenaga pendidik yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

c. *Kegiatan Koordinasi Forum antar Etnis*

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kerukunan antar etnis dengan melakukan rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan, pada tahun 2019 dilakukan 2 kali rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan.

- Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilkada pada tahun 2019 dari target 70% dan yang terealisasi 70%. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

a. Kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada LSM/Ormas dan yayasan sehingga terwujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran Ormas dan Lembaga kemasyarakatan sehingga terjadi toleransi dalam bermasyarakat. Pada Tahun 2019 jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan sebanyak 100 orang.

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan pelaporan pelaksanaan Pemilu 2019 untuk memberikan informasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Bima.

Kemudian sebagai bahan perbaikan bagi pengambilan kebijakan untuk merumuskan regulasi dibidang kepemiluan di masa yang akan datang. Adapun tugas Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilu antara lain melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Caleg/Pilpres di Kota Bima Tahun 2019. Kemudian menginventarisasi dan melaksanakan pencatatan dari permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum selanjutnya melaporkan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Pemilu 2019.



- c. Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan rekomendasi bantuan keuangan dari Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meverifikasi proses administrasi bantuan keuangan kepada partai politik. Tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Bima. Partai yang telah menyampaikan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik sebanyak 12 partai politik, hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik akan menjadi rekomendasi tim kepada walikota Bima untuk penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2019. Rekomendasi ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan keuangan guna kelancaran kegiatan partai politik khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dana ini menjadi penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional secretariat partai politik, sesuai permendagri tersebut partai dapat menggunakan dana bantuan untuk pendidikan politik sebesar 60% dan untuk menunjang kegiatan secretariat sebesar 40%.

d. Pendidikan Politik Bagi kelompok pemuda dan masyarakat dalam rangka Pileg/Pilpres

Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya. Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang-orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.

Urgensi pendidikan politik pada Pemilu 2019 adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum nantinya. Etika dan norma menjadi pedoman untuk ditaati bersama oleh setiap calon. Berkaca pada

kepemimpinan masa kholifah yang penuh kesederhanaan dan benar-benar mengabdikan kepada rakyatnya adalah pemimpin yang akan membawa kepada kesejahteraan hal ini perlu menjadi doktrin kepada masyarakat kita, memberi bukti melalui tindakan dan bukan menjual janji belaka. Pada Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah melaksanakan pendidikan politik yang diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari pemuda dan masyarakat.

e. Sosialisasi Pileg/Pilpres bagi Pemilih Pemula

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan segera dilaksanakan. Pesta rakyat ini akan diikuti masyarakat yang telah memiliki hak suara. Salah satunya pelajar sebagai pemilih pemula.

Pengetahuan pelajar sebagai pemilih pemula tentang pemilu masih minim, sehingga butuh sosialisasi yang gencar untuk memberikan edukasi Pemilu kepada mereka.

Pemilih Pemula adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu :

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang Rasional.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.

7. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu.

Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda tersebut membutuhkan pemikiran dan penanganan yang serius dalam Pemilu dan pemilu mendatang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada tahun 2019 telah melakukan sosialisasi Pileg/Pilpres bagi Pemilih Pemula sebanyak 8 kali bertempat di MAN 2 Kota Bima dan Pondok Pesantren Al Husainy yang di ikuti oleh 960 Orang Pemilih Pemula.



3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp.5.655.897.411,- dan terealisasi sebesar Rp.5.487.870.797,- atau sebesar 97,03%. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp.1.387.544.011,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merealisasikan sebesar Rp.1.376.436.728,- atau sebesar 99,19%. Adapun belanja langsung, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.4.268.353.400,- direalisasikan sebesar Rp.4.111.434.069,- atau sebesar 96,32%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.1

Rekapitulasi Belanja BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	1.387.544.011,-	1.376.436.728,-	99,19
2	Belanja Langsung	4.268.353.400,-	4.111.434.069,-	96,32
	Jumlah	5.655.897.411,-	5.487.870.797,-	97.03

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun 2019

N o	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis	1.819.230.500	1.809.747.500	99,48
		Penguatan Forum Kewaspadaan Masyarakat (FKDM) Dini	248.790.000	244.493.923	98,27
		Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	110.176.000	104.476.000	94,83
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan ketahanan social, budaya dan agama	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	384.055.000	340.008.460	88,53
		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	104.800.000	102.300.000	97,61
		Koordinasi forum antar etnis	69.130.000	57.720.000	83,49
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang	Penyuluhan Kepada Masyarakat	94.255.000	87.780.041	93,13
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	155.310.900	153.179.800	98,63

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	kehidupan berpolitik	Verifikasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Permohonan Rekomendasi Bantuan Keuangan	78.382.000	72.300.000	92,24
		Pendidikan Politik bagi kelompok pemuda dan masyarakat dalam rangka Pileg/Pilpres	44.790.000	26.900.000	60,06
		Sosialisasi Pileg/Pilpres bagi Pemilih Pemula	264.103.500	255.270.000	96,66

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2.3
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	20.800.000	20.235.000	97,28

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	10.200.000	7.320.374	71,77
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	24.500.000	22.346.620	91,21
		Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	65.255.000	64.800.000	99,30
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.445.000	9.900.000	73,63
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	29.675.000	29.607.000	99,77
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.150.000	23.900.000	84,90

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	100,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.400.000	15.000.000	91,46
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	37.300.000	36.870.000	98,85
		Penyediaan makanan dan minuman	0	0	0
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.088.500	299.342.750	99,99
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	101.014.000	96.653.600	95,68

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	28.518.000	28.448.000	99,75
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	12.150.000	3.000.000	24,69
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	15.600.000	15.600.000	100,00
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu	17.000.000	17.000.000	100,00
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	9.570.000	9.570.000	100,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	16.400.000	16.400.000	100,00

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	71.270.000	69.470.000	97,47
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	74.770.000	68.570.000	91,71

BAB IV PENUTUP

4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2019 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2019.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2019 semuanya telah direalisasikan dengan kategori Berhasil dengan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis sebesar 100%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 97,03 %.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2019 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana dalam menjaga keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyediaan peraturan daerah tentang Tata Cara Perlindungan masyarakat untuk menjadi dasar implementasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Dengan peraturan daerah ini juga akan meningkatkan integrasi dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam kehidupan masyarakat Kota Bima yang demokrasi, tertib dan tentram.
2. Pemanjapan Tugas Intelijen Daerah yang telah dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta mendorong tumbuhnya kader-kader Intelijen yang mampu melakukan deteksi dini serta dapat mengeliminir setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah

- dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Intelijen melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
3. Perlu penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Kota Bima, 3 Pebruari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota



ACH. FATHONI

NIP. 19650602 198903 1 023